

PEREMPUAN DALAM TANTANGAN PENDIDIKAN GLOBAL:

Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan *Millenium Development Goals*

Dailatus Syamsiyah

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
D. I. Yogyakarta, Indonesia

dail_sy@yahoo.com

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam pendidikan semakin mendapatkan momentumnya melalui indikator GDI (*Gender Development Index*) yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan. Kenyataannya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah. Sejumlah faktor baik agama, budaya, sosial, politik dan budaya ditengarai menjadi penyebab. Pandangan perempuan yang penting melek huruf perlu diubah dengan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan. Peningkatan persentase pendidikan perempuan di Indonesia pada gilirannya akan dapat meningkatkan pencapaian MDG's yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memberantas kemiskinan.

Kata Kunci: partisipasi perempuan, pendidikan

ABSTRACT

The participation of women in education is increasingly gaining its momentum through indicators GDI (Gender Development Index) which is concerning about equality between men and women in life expectancy , education and income amount . In fact the numbers of female participation in education is still low. A number of factors such as religious, cultural, social, and political factors suspected to be the main cause. The views about women's literacy are important to be changed to improve access to education for women's equality. The increase in the percentage of female education in Indonesia in turn will be able to improve the achievement of the MDG's is to reduce maternal mortality, reduce child mortality, and combating poverty.

Key word: participation of women, education

A. Pendahuluan

Adanya fenomena keluarga yang melemparkan tanggung jawab pendidikan anak-anaknya pada lembaga sekolah merupakan satu dari ribuan data tentang praksis pendidikan dalam masyarakat yang membawa berbagai persoalan. Oleh karena itu, perlu mempertanyakan kembali hakikat peran keluarga dalam pendidikan anak yang terkait dengan lembaga lain. Aristoteles dengan familiarismenya menganggap keluarga (*oikos*) sebagai inti pokok fondasi masyarakat (*polis*) yang menentukan hidup matinya sebuah masyarakat (Basis, 2006: 35). Dengan kata lain, perkembangan masyarakat itu akan banyak tergantung pada proses pendidikan yang terjadi di dalam keluarga.

Pada zaman Romawi kuno, garis pemikiran familiarisme ini semakin menemukan relasi konkret secara politis ketika model pendidikan pater familias menjadi fondasi kokoh bagi

berlangsungnya tata kehidupan masyarakat. Dalam sistem pater familias, keluarga memiliki kedudukan sentral dalam pendidikan anak. Proses pendidikan lebih menekankan dimensi praktis-imitatif di mana sang anak sejak kecil telah dibiasakan untuk melihat dan merasakan bagaimana orang tua melakukan tugas-tugas publik maupun domestiknya. Pada zaman itu, seorang ibu mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak. Sampai anak berumur tujuh tahun, tugas utama pendidikan dipercayakan pada ibu karenanya, para ibu tidak hanya taat pada otoritas suaminya, tapi juga aktif terlibat dalam pendidikan anak.

Perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Selain mereka harus mempersiapkan diri untuk bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, menyusul pula tanggung jawab lain berupa tanggung jawab sepenuhnya atas anak-anak mereka baik jasmani, kebutuhan akan kasih sayang serta tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka. Pemenuhan akan pendidikan anak tidak sekedar memberi kesempatan anak-anak mereka untuk belajar serta disekolahkan (pendidikan secara formal) semata. Peranan perempuan dalam pendidikan dalam suatu keluarga secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, membentuk keluarga yang kondusif bagi pendidikan anak. Dalam hal ini lingkungan keluarga memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak. Akan tetapi masing-masing keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda pula terhadap pendidikan yang diselenggarakan secara formal tersebut.

Kedua, perempuan sebagai pendidik. Masing-masing keluarga memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimanapun sibuknya orang tua tidak sepatutnya melupakan pendidikan terhadap anak-anaknya, apabila tidak menginginkan pada

suatu saat tidak dihargai oleh anak-anaknya (Santhut, 1989: 34)

Ketiga, perempuan sebagai pelindung dan pemelihara; dan *Keempat*, perempuan sebagai peletak dasar pendidikan anak. Salah satu tugas pendidikan ialah membuat anak menjadi dewasa dan mandiri. Pendidikan awal oleh keluarga dan terutama perempuan/ibu merupakan fondamen bagi perkembangan kepribadian anak melalui pendidikan di tengah keluarga (Darajat, 1997: 35), dalam hal ini khususnya perempuan (sebagai ibu).

Perempuan adalah makhluk penuh mistri, *-mysterium fascinorum* atau mistri yang menawan menurut istilah Fuad Hasan mantan menteri P&K era Orde Baru- makhluk kontroversial dan paling sulit dipahami sekaligus sering di salah tafsirkan. Kontroversi tentang perempuan meliputi fungsi, peran dan bahkan pada sebutan kata “perempuan” itu sendiri (Roqib, 2003: 21).

Tidak kurang dari 5 abad kontroversi mengenai perempuan telah diperbincangkan, dan menemukan momentumnya serta menjadi perbincangan internasional sejak UNDP (*United Nations Development Program*) melalui laporan berkalanya “*Human Development Report (HDR)*” pada tahun 1990 memperkenalkan sebuah tambahan indikator baru dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu Negara yang sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan “*Growth Domestic Product (GDP)*”. Ukuran tambahan ini adalah indikator pembangunan manusia atau “*Human Development Index (HDI)*”. Pengenalan konsep HDI ini melalui pengukuran tiga aspek yaitu : usia harapan hidup (*life expectancy*), angka kematian bayi (*infant mortality rate*) dan kecukupan pangan (*food security*) (UNDP HDR www.undp.org). Hal ini memberi pengaruh yang besar pada arah kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai Negara. Pertumbuhan ekonomi adalah penting, tetapi tidak selalu menggambarkan keberhasilan

pembangunan kualitas manusia. Melalui HDI pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan dalam konteks peningkatan kualitas manusia melalui iklim dan kebijakan yang tepat. Pembangunan manusia diartikan sebagai usaha untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh strata masyarakat secara merata dan berkesinambungan sampai generasi berikutnya, yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam –dan dapat mengecap hasil- proses pembangunan.

Setelah 5 tahun konsep HDI diperkenalkan, UNDP memerinci lebih lanjut tentang arti pemberdayaan masyarakat ini, bahwa bukan saja diberikan kepada seluruh strata masyarakat, melainkan yang terpenting adalah kepada segmen masyarakat perempuan, dan hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan ke IV yang diselenggarakan di Beijing, China pada tanggal 4-15 September 1995. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*). Indonesia, sebagai negara anggota PBB pun ikut berpartisipasi dalam Konferensi tersebut dan tentu saja mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat/organisasi non-pemerintah, kelompok perempuan, pelaku pendidikan, media massa, pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Maka konsep HDI sejak tahun 1995 diberi tambahan lagi, yaitu konsep kesetaraan gender (*gender equality*) sebagai faktor yang harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi

keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (*gender development index*) yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan, serta GEM (*gender empowerment measure*) yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya.

Konsep HDI ini telah memberikan inspirasi yang besar pada penentuan arah dan kebijakan pembangunan di banyak negara berkembang, sehingga pembangunan sumber daya manusia telah memperlihatkan kemajuan yang pesat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan partisipasi dalam bidang ekonomi dan politik. Perhitungan menggunakan GDI juga berkontribusi dalam meningkatkan jumlah (kuantitas) keterlibatan, partisipasi dan peran serta kesempatan kaum perempuan untuk sejajar dengan laki-laki.

Konsep kesejajaran atau bahkan kesetaraan perempuan dan laki-laki menumbuhkan kronika dan perdebatan panjang serta melahirkan kelompok-kelompok yang pro maupun kontra. Tulisan ini tidak berpretensi untuk membahas panjang lebar kronika tersebut, melainkan sedikit yang terkait dengan pendidikan kaum perempuan.

B. Pembahasan

1. Realita Perempuan dalam Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan bagi kaum perempuan masih rendah. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan keprihatinannya yang diungkapkannya di Jawa Pos beberapa waktu lalu. Keprihatinan Muhammad Nuh terkait dengan kenyataan empiris bahwa masih banyak perempuan yang hanya lulusan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan menengah atau bahkan pendidikan tinggi. Meskipun data statistik menunjukkan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki selalu di sekitar

angka 100% untuk jenjang SD/MI. Namun demikian rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang SMP/ MTs sejak tahun 1994 selalu lebih dari 100 persen, dan pada tahun 2004 sebesar 103,4%. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan lanjutan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari 95,2 persen pada tahun 1994 menjadi 103,7 persen (2000) dan menjadi 98,7 (2004). Peningkatan yang tajam pada tahun 1998-2000 diduga karena pengaruh menurunnya taraf ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya anak laki-laki yang putus sekolah karena harus bekerja (www.suaramerdeka.com, www.bps.go.id, www.menegpp.go.id).

Data statistik ini memberikan visualisasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, namun data ini bukan representasi dari jumlah perempuan secara keseluruhan. Menurut Nur Syam dalam blog-nya (www.nursyam.sunan-ampel.ac.id) bahwa ada beberapa variabel yang menyebabkan kenapa banyak perempuan yang tidak memiliki kecenderungan untuk melanjutkan pendidikannya. *Pertama*, pandangan teologis bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Dia adalah tulang rusuk lelaki, sehingga posisinya dalam relasi antara lelaki dan perempuan adalah relasi yang tidak seimbang. Lelaki lebih superior sementara perempuan lebih inferior. Pandangan ini ada yang diangkat dari teks ajaran agama, bahwa yang bisa menjadi pemimpin adalah kaum lelaki sementara perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.

Kedua, pandangan sosiologis, bahwa perempuan dalam banyak hal diposisikan berada di dalam rumah. Lebih banyak berada di dalam urusan domestik ketimbang urusan publik. Masih banyak pandangan sosiologis, yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Relasi antara lelaki dan perempuan berada di ruang rumah tangga, sehingga perempuan lebih banyak berada di ruang domestik tersebut.

Ketiga, pandangan psikologis, bahwa perempuan dianggap tidak penting untuk berpendidikan karena posisinya lebih banyak menjadi istri. Di dalam tradisi Jawa, masih banyak anggapan bahwa perempuan harus cepat dikawinkan. Kawin muda jauh lebih baik ketimbang menjadi perawan tua. Ada ketakutan luar biasa di kalangan orang tua, jika anak perempuannya tidak sesegera mungkin memperoleh jodoh. Ada semacam pandangan bahwa lebih baik menjadi janda muda dari pada menjadi perawan tua.

Keempat, pandangan budaya, adanya anggapan bahwa perempuan merupakan sosok manusia yang secara kebudayaan memang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Di dalam hal ini, maka perempuan hanya menjadi pelengkap saja. Ada ungkapan tradisi yang menyatakan "perempuan itu, *suwargo nunut neroko katut*". Artinya bahwa perempuan itu hanyalah *konco wingking*, atau kawan di belakang atau di dalam rumah.

Kelima, pandangan ekonomi, bahwa banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya, karena ketidakmampuan ekonomi. Banyak orang tua tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Banyak yang karena alasan ekonomi kemudian perempuan tidak melanjutkan pendidikannya. Jika misalnya ada dua anak: lelaki dan perempuan, maka yang diminta untuk melanjutkan adalah yang lelaki, sementara yang perempuan sesegera mungkin dikawinkan agar terlepas dari beban ekonomi keluarga.

Pandangan stereotip seperti ini yang menyebabkan kenapa angka partisipasi pendidikan di kalangan perempuan masih rendah. Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, yang kemudian tidak melanjutkan pendidikannya. Jika sudah lulus sekolah dasar, maka sudah dianggap cukup, yang penting bisa membaca.

Realita ini memang cukup memprihatinkan dan memicu simpati banyak kalangan. Bagaimana bisa perempuan

yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya justru mendapatkan kesempatan yang sangat terbatas untuk terlibat dalam pendidikan? Benarkah faktor budaya penyebab utama keadaan ini?

Beberapa variabel yang disebutkan Nur Syam di atas bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Namun jika melihat konteksnya, Indonesia termasuk kategori miskin jika disejajarkan dengan negara-negara maju di mana partisipasi perempuan dalam pendidikan telah sejajar atau bahkan setara dengan laki-laki. Realita ini dapat dijelaskan dengan teori alokasi yang disebut *house hold resource allocation theory* yang dikembangkan oleh Jere Behrman. Analisa *excellent* dari Ratna Megawangi terhadap persoalan ini patut diapresiasi. Menurutnya ada 3 macam alokasi sumber daya keluarga (Megawangi, 1999: 35-39). *Pertama*, ketika orang tua mengalokasikan sumber daya yang ada pada anak-anaknya mengikuti model investasi murni (*pure investment mode*). Model ini akan berlaku apabila keluarga dalam kondisi miskin, di mana sumber daya yang ada akan dialokasikan pada sektor yang paling menguntungkan. Dalam hal ini, biasanya anak laki-laki diharapkan dapat membantu orang tua dan adik-adiknya kelak kalau sudah bekerja. Karenanya anak laki-laki akan mendapatkan prioritas. Sedangkan anak perempuan, diharapkan dapat bergantung pada suaminya kelak, dan karena keterbatasan uang maka pendidikan anak perempuan menjadi prioritas kedua.

Kedua, adalah model investasi di mana orang tua bersikap netral, yaitu orang tua akan mengalokasikan sumber dayanya secara merata pada seluruh anak-anaknya tanpa preferensi gender tertentu. Model ini disebut *Rawlsian*, yang diambil dari nama John Rawls yang mengembangkan teori tentang keadilan (*theory of Justice*). Keadaan ini dapat berlaku ketika sumber daya keluarga tidak terbatas lagi, sehingga alokasi sumber daya cenderung lebih merata. Behrman

menguji teorinya dengan menggunakan data keluarga Amerika dan India. Untuk Amerika yang tingkat sosial ekonominya rata-rata sudah tinggi, ternyata para orang tua bersikap relatif netral, bahkan anak-anak perempuan mendapat porsi yang lebih besar dari pada anak laki-laki. Sedangkan untuk India, Behrman menganalisis dengan menggunakan data distribusi makanan dalam keluarga pada musim panen dan musim paceklik. Ia mendapatkan pada musim panen, di mana sumber daya pangan dalam keluarga mencukupi, tidak terdapat perbedaan pada alokasi pangan pada anak-anak berdasarkan jenis kelamin. Namun pada musim paceklik di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, alokasi pangan mengikuti model investasi murni, yaitu suami mendapatkan porsi terbesar. Hal ini menurut Behrman merupakan tindakan yang sangat rasional. Karena kalau suami sebagai *breadwinner* kekurangan makan, maka ia akan sakit dan tidak dapat bekerja, yang akan membuat seluruh keluarga justru akan lebih menderita.

Ketiga adalah alokasi yang lebih mementingkan yang lebih menderita. Model ini –masih menurut Ratna Megawangi- disebut *compensated strategy* di mana orang tua akan memberikan porsi terbesar pada anak-anak yang berada pada posisi kurang menguntungkan daripada saudara-saudaranya. Model ini berlaku pada keluarga yang sumber dayanya sudah tidak terbatas lagi dan ada pertimbangan moral dalam hal ini. Ratna memberikan contoh keluarga yang memiliki anak dengan mental terbelakang. Orang tua yang tingkat ekonominya sudah cukup akan mengirimkan anaknya ke sekolah luar biasa, yang biasanya memerlukan biaya yang jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Jelas anak tersebut mendapatkan porsi yang lebih besar daripada saudara-saudaranya yang normal.

Menganalisa keterlibatan perempuan dalam pendidikan dengan *house hold resource allocation theory* ini dapat

membuka cakrawala pemahaman baru terutama ketika menilai mengapa tingkat pendidikan pria lebih tinggi daripada perempuan, atau jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi jauh lebih sedikit daripada jumlah pria. Melalui teori alokasi sumber daya ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa memang faktor budaya masih tetap berperan dalam menciptakan ketidakseimbangan ini, tetapi faktor budaya ini tidak berarti meruntuhkan pendapat bahwa faktor ekonomilah yang paling dominan menjadi sebab sedikitnya kesempatan dan keterlibatan perempuan dalam pendidikan, di samping juga faktor keragaman biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat pula mempengaruhi corak budaya.

Betapapun faktor budaya turut andil dalam “menciptakan” kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, namun perempuan Indonesia saat ini telah bergerak ke arah yang *progress* dalam hal partisipasi dalam pendidikan. Kalaupun data BPS menunjukkan bahwa pada 2001 persentase perempuan buta huruf sebesar 14,54 persen, sedangkan laki-laki hanya 6,87 persen. Pada 2002 angka buta huruf perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional mencapai 12,69 persen dan laki-laki hanya 5,85 persen. Setahun berikutnya (2003), angka buta huruf perempuan turun menjadi 12,28 persen sementara laki-laki 5,84 persen, namun ternyata banyak perempuan berusia di atas 50 tahun yang buta huruf karena pada masa-masa awal pasca kemerdekaan masih sedikit sekolah yang tersedia di Indonesia dan mayoritas penduduknya masih miskin.

2. Kajian Kontekstual Realita Perempuan dalam Pendidikan

Konsep HDI yang digulirkan oleh UNDP telah menginspirasi banyak negara berkembang dalam penentuan arah dan kebijakan pembangunan, sehingga pembangunan sumber daya manusia telah memperlihatkan kemajuan yang cukup positif, tanpa kecuali di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama masyarakat

perempuan mulai meningkat sehingga dapat menempatkan Indonesia pada posisi 124 ranking HDI (*Human Development Index*) yang masuk kategori *medium human development* (www.undp-hdr.org/& www.wikipedia.org/). Partisipasi perempuan Indonesia pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang. Sebut salah satunya adalah dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan.

Menyambut *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 di mana Indonesia harus melaporkan pada dunia pencapaian 8 target MDGs yaitu; (1). Memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan; (2). Mencapai pendidikan dasar universal; (3). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4). Mengurangi angka kematian anak; (5). Meningkatkan kesehatan Ibu; (6). Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7). Menjamin kelestarian lingkungan; dan (8). Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kalau melihat pada pencapaian MDGs pada tahun 2010, untuk indikator pemberantasan kemiskinan, masih menyisakan 5,9% penduduk yang memiliki pendapatan per kapita per hari di bawah USD 1 atau sama dengan sekitar 15 juta penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Untuk indikator kematian ibu, pencapaian Indonesia pada tahun 2010 terdapat 226 orang per tahun, angka ini diharapkan berkurang menjadi 102 orang pada 2015. Untuk indikator kematian bayi, pencapaian Indonesia tahun 2007 adalah 34 per 1000 kelahiran sedangkan target yang dicanangkan tahun 2015 adalah 23 per 1000 kelahiran (<http://www.undp.or.id/pubs/docs/MDGs>).

Pada hakikatnya Indikator MDGs poin 1 (Pemberantasan kemiskinan), MDGs poin 4 (Menurunkan Kematian Anak), dan MDGs poin 5 (Menurunkan angka kematian Ibu) dapat dikendalikan persentasenya jika pendidikan perempuan di Indonesia sudah terpenuhi dengan baik, dan jika partisipasi perempuan dalam pendidikan -minimal sampai pendidikan

menengah atas- telah meningkat, dan jika semua perempuan telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang “diri” nya, keluarganya, peranannya, dan juga kebutuhannya. Dengan demikian, perempuan yang berpendidikan dan atau yang memiliki pengetahuan, dapat meningkatkan pencapaian MDG’s yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, dan memberantas kemiskinan.

Begitu pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, juga peningkatan pengetahuan bagi kelompok masyarakat perempuan, karena perempuan (Ibu) adalah “sekolahan” bagi anak-anaknya, pendidik pertama dan utama dalam keluarganya, bahkan perempuan menjadi indikator kuatnya suatu bangsa. Namun realitanya, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perempuan dengan sukarela mau terlibat dalam pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Tidak sedikit perempuan yang sudah merasa puas dengan pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang sudah diraihinya. Seperti analisis Nur Syam di atas, bahwa tidak sedikit perempuan yang sudah merasa cukup dengan “yang penting bisa membaca”.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan keyakinan mayoritas perempuan “yang penting bisa membaca”. Karena membaca adalah pintu awal pengetahuan. Sedang pengetahuan berbanding lurus dengan pendidikan. Di era globalisasi saat ini, membaca sudah menjadi “tradisi”, hampir semua orang dari berbagai lapisan, berbagai latar belakang budaya, agama dan sosial, menjadi gemar membaca. Apapun jenis bacaan yang dikonsumsi; mulai dari hiburan, berita selebritas, berita politik, berita kriminal, resep masakan, nasihat agama, info perhotelan, wisata, sampai bacaan yang agak berat dan mengandung muatan filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, kajian tafsir al-Quran dan Hadits, serta disiplin ilmu-ilmu yang lain. Medianya juga sangat beragam dan mudah diakses, mulai dari buku-buku, majalah, Koran, bulletin, facebook, twitter,

sampai dengan berita *online* yang bisa diakses melalui telepon seluler. Semua capaian teknologi informasi tersebut seolah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk “membaca”. Sehingga hampir bisa dipastikan seluruh segmen masyarakat telah “melek informasi” atau telah memiliki pengetahuan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan>).

Menurut Nila Djuwita Anfasa Moeloek utusan khusus Presiden untuk MDGs, pada Jawa Pos mengatakan bahwa perempuan harus punya pengetahuan, terutama tentang kesehatan. Untuk memperoleh pengetahuan tidak harus melalui jalur formal (sekolah) saja karena era globalisasi dan informasi menyediakan banyak pengetahuan (Jawa Pos Sabtu, 26 April 2014, hlm. 12). Maka, persentase partisipasi perempuan dalam pendidikan –khususnya pendidikan tinggi – yang masih rendah, bisa diimbangi dengan peningkatan pengetahuan kaum perempuan.

Dengan bekal “bisa membaca” mayoritas perempuan masa kini tidak terpisahkan dengan era *digital lifestyle*. Mulai dari penggunaan komputer, ponsel, peralatan kantor maupun rumah, sampai ke dunia majalah. Serba praktis, ekonomis, dan efisien. Ditambah lagi tawaran “pengetahuan” di dunia *online* sangat beragam dan berjuta pilihan. Mulai dari berita-berita ringan sampai yang serius, dari yang faktual sampai yang fiktif, dari deskripsi tentang realitas sampai yang pos-realitas, dari yang imajinatif dan ilusif sampai yang halusinatif, dan dari yang menghibur sampai yang mengharubiru. Begitu juga berbagai macam tulisan dan artikel tentang kesehatan, politik, sosial, ekonomi, property, investasi, kecantikan, seksualitas, selebritas, *entertainment*, masak memasak, sampai tips merawat kuku dari kutub utara sampai daerah-daerah di pelosok Papua bisa diakses tanpa harus beranjak dari tempat duduk perempuan. Begitu kolosal dan *massive* kemajuan teknologi informasi merambah dan mungkin juga “menjajah” perempuan masa kini.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri dampak positif kemajuan teknologi informasi -yaitu kemampuannya memberikan pengetahuan pada penggunanya, telah pula membuat banyak perempuan yang berpendidikan rendah namun memiliki pengetahuan setara dengan yang berpendidikan tinggi. Banyak perempuan yang tadinya “buta informasi”, kini menjadi sangat konsumtif terhadap informasi. Banyak perempuan desa yang sering kali dilabeli dengan istilah “*ketinggalan zaman*”, kini memiliki cukup pengetahuan yang tidak kalah dengan perempuan kota dan perempuan di daerah-daerah urban. Kemajuan teknologi memberikan pilihan cara yang begitu *private* kepada perempuan untuk mengakses berbagai pengetahuan yang dibutuhkannya. Sehingga sekat-sekat psikologis, fisiologis dan geografis yang sering kali menghambat perempuan untuk mendapatkan pengetahuan, tereduksi secara sempurna. Perempuan sudah tidak perlu malu dan *sungkan* lagi berdiskusi tentang seksualitas dirinya, keluarganya, cara mengasuh anak, mengatasi kenakalan anak, konsultasi tentang perilaku menyimpang pasangannya, penyakit yang dideritanya bahkan tentang “kekurangan” yang dimilikinya, karena semua itu bisa dilakukan melalui *tele-learning* atau *tele-conference* atau secara *online* melalui komputer pribadinya atau telepon genggamnya.

Realitanya saat ini, pengetahuan membuat perempuan cerdas dan semakin *multi-tasking*. Perempuan tidak lagi menjalani rutinitas domestik sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak saja, melainkan juga turut eksis di dunia publik yaitu dengan bekerja di kantor atau menjadi wirausaha guna menghasilkan uang. Kendati demikian, di tengah pengelolaan waktu perempuan yang harus efektif (*doing the right job*) dan efisien (*doing the job right*), keluarga tetap menjadi prioritas utama perempuan. Merujuk pada hasil laporan MarkPlus Insight tahun 2010 (<http://www.markplusinsight.com/>), masalah kesehatan, khususnya kesehatan keluarga menjadi

kekhawatiran perempuan. Namun, hasil riset MarkPlus Insight tahun 2013 memberikan gambaran berbeda. Untuk masalah kesehatan, perempuan kini lebih cemas terhadap kesehatan dirinya sendiri. Perempuan merasa, urusan domestik akan jauh lebih baik jika ia dapat berperan aktif dalam kondisi yang sehat.

Perempuan peduli tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarga dan anaknya. Tuntutan hidup membuatnya bertindak kreatif dan inovatif untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini tidak jauh berbeda dengan perempuan di zaman dahulu, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Dari dahulu hingga sekarang secara naluriah perempuan selalu ingin membantu ekonomi keluarga dengan berbagai cara. Mulai jadi buruh tani, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pegawai, sampai rela meninggalkan keluarganya untuk mencari rezeki di negeri orang, semua untuk peningkatan ekonomi keluarga. Di zaman sekarang *ethos* itu pun masih belum berubah. Di tengah *multi tasking* perempuan sebagai penguasa domestik sekaligus pekerja di sektor publik, perempuan pun masih merasa punya waktu memanfaatkan teknologi internet untuk berbisnis, yang dikenal dengan bisnis *online*. Kegiatan ini mendapatkan aktualisasinya di tengah-tengah jenuh bekerja bagi perempuan pekerja, atau untuk mencari pendapatan tambahan bagi perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Semua dilakukan perempuan dengan penuh sukarela dan tanpa paksaan.

Kiranya MDGs Indonesia tahun 2015 akan mengalami peningkatan pada indikator pemberantasan kemiskinan, kesehatan ibu dan penurunan angka kematian anak serta pengurangan angka pengangguran. Hal ini mengingat angka partisipasi perempuan dalam pendidikan, kesadaran perempuan akan kesehatan dirinya dan keluarganya, juga intensitas perempuan yang “berburu” pengetahuan sudah sangat *massive*. Peningkatan persentase pada ketiga indikator

ini (indikator 1, 4, dan 5) pada saatnya pasti akan berimbang pada pencapaian indikator yang lainnya. Sehingga peningkatan ini akan dapat menempatkan Indonesia pada ranking HDI (*Human Development Index*) lebih baik dari sebelumnya.

C. Simpulan

Dalam dunia *marketing* dikenal istilah *Youth, Women and Netizen* (YWN) atau tiga subkultur penentu masa depan sebuah merek, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Demikian pula dalam sebuah Negara atau bangsa, *women* atau perempuan menjadi penentu masa depan dan indikator utama keberhasilan pembangunan. Karena dalam diri perempuan terdapat hasrat yang selalu hidup dan aktual yang dipetakan oleh MarkPlus Insight ke dalam slogan WOMEN, yaitu *Well being* (kesejahteraan), *Optimistic* (tidak pesimistis), *Multi-tasking* (dapat membagi waktu antara tugas di dalam dan di luar rumah), *Enterprenuer* (dapat berwirausaha untuk menghasilkan pendapatan pribadi di luar suami), dan *Networker* (tidak bisa hidup sendiri, tidak ingin dikucilkan). Hasrat ini yang menjadi pendorong perempuan untuk selalu maju dan meng *up grade* pengetahuan dan pendidikannya. Sehingga angka partisipasinya dalam berbagai bidang hampir setara dengan kaum pria. *Wallahu ‘a’lam bis showab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Basis, Edisi Juli-Agustus 2006
- Darajat, Zakiah, 1997, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- HDI rankings tahun 2010 – 2011. www.undp-hdr.org/ www.wikipedia.org/
- Jurnal Demokrasi Volume I, No. 2 Mei 2003 Forum LSM Yogyakarta
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda?*, Bandung: Mizan.
- Roqib, Moh., (2003), *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media.
- Santhut, Khatib Ahmad, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, Mitra Pustaka, Yogyakarta: 1998
- Syam, Nur, *Pendidikan Bagi Kaum Perempuan*, dalam www.nursyam.sunan-ampel.ac.id
- UNDP HDR/ www.undp.org
- www.bps.go.id,
- www.markplusinsight.com
- www.menegpp.go.id
- www.suaramerdeka.com